



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENELITIAN DATA DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

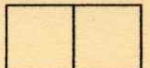
Nomor: PKS/131/XII/DT/HK/2019/BNN

Nomor: MOA/059/XII/2019/UBJ

TENTANG
PELAKSANAAN KAJIAN STRATEGI ACTIVE DEFENSE DALAM
PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (31-12-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H.**, Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



2. **Dr. AAN WIDODO, S.I.Kom., M.I.Kom.,** Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 67 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: NK/16/III/KA/HK/2019/BNN dan Nomor: MOU/06/III/2019/UBJ tanggal 5 Maret 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288); dan
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 074/D/O/1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. KEP/05/IX/1995 tentang Yasasan Brata Bhakti Polri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. persiapan kajian meliputi penyusunan proposal, pembuatan instrumen, pembuatan pemodelan dan uji coba pemodelan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data lapangan;
- c. pelaksanaan supervisi pengumpulan data lapangan;
- d. pelaporan kajian meliputi pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan hasil kajian, *policy paper*, dan *policy brief*;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

BAB III

PERSIAPAN KAJIAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** menentukan tema dan arah kajian.
- (2) **PIHAK KESATU** memfasilitasi seluruh kebutuhan dalam kajian dan menentukan tim supervisi.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan:
 - a) penyusunan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal;
 - b) penyempurnaan metode;
 - c) pemetaan *sampling area*;
 - d) penyusunan instrumen; dan
 - e) penyusunan pemodelan.

- (4) **PARA PIHAK** memaparkan rancangan proposal di hadapan Kepala Badan Narkotika Nasional dan pimpinan satuan kerja untuk memperoleh masukan dan persetujuan Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (5) **PARA PIHAK** membentuk Tim Pengkajian dan menyusun uraian tugas masing-masing tim.

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

Pasal 4

PARA PIHAK melaksanakan pengumpulan data dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam proposal kegiatan Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.

SUPERVISI

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan supervisi pelaksanaan pengumpulan data di beberapa *sampling area*.

PELAPORAN KAJIAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menyusun laporan pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba melalui proses pengolahan dan analisis data.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui pemaparan di depan Kepala Badan Narkotika Nasional dan seluruh pimpinan Satuan Kerja.
- (4) Laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan *policy paper* dan *policy brief* sebagai bahan kelengkapan dalam laporan akhir.
- (5) Laporan keluaran kegiatan (*output*) dari hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen hasil kajian akademik pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba.
- (6) Dokumen laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai dibuat paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan kajian.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mengajukan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan kajian secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapat persetujuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan penyusunan pelaksanaan Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba dilaksanakan dalam bentuk kajian pustaka, studi media, *field work*, *focused group discussion*, dan *workshop*.
- (3) Dokumen administrasi dan laporan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan kajian.
- (4) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan, dikompilasi, dan diperiksa oleh Tim Administrasi **PARA PIHAK**.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan dilaporkan setiap bulan oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.

- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau menggunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak manapun atas segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama terkait seluruh data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Akses atas data dan informasi rahasia kajian harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi personel **PARA PIHAK** yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Data dan informasi yang dimaksud dalam Pasal ini adalah data dan informasi kajian.
- (6) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
PUBLIKASI HASIL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Personel/peneliti masing-masing pihak, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, dapat membuat karya tulis ilmiah dengan menggunakan data hasil Perjanjian Kerja Sama ini dan mempublikasikannya untuk media di wilayah hukum Indonesia maupun di luar Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11, dan sepengetahuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** dilarang menggunakan nama institusi **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya untuk membuat promosi atau iklan pemasaran produk hasil kajian, kecuali untuk digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dengan perjanjian tersendiri atau ijin tertulis dari pihak lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pembiayaan pelaksanaan tiap lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Teknis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pembayaran elektronik.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU : Pusat Penelitian Data dan Informasi**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630

Telepon : 021-8087 1556

Faksimili : 021-8088 5225

Email : puslitdatin@bnn.go.id

b. **PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Komunikasi**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 67 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Telepon : 021-8895 5882

Email : fikom.akademik@ubharajaya.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.Si., M.H.

PIHAK KEDUA,

A blue ink handwritten signature is written on the right side of the page.

Dr. AAN WIDODO, S.I.Kom., M.I.Kom.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/0\ /VI/2020/Puslitdatin

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H.

Pangkat/Golongan : Brigjen / IV d

NRP : 68080359

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

Menerangkan bahwa :

Nama Instansi : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 67 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Pada tanggal 31 Desember 2019 FISIP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penelitian dengan Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN, dengan Nomor : PKS/131/XII/DT/HK/2019/BNN dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Strategi *Active Defence* Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk digunakan dalam memenuhi data penelitian Universitas ke dalam Database Dikbud , yaitu Simlitabmas (Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

Jakarta, 16 Juni 2020

Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN



Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H.